



KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.
hanri@lpem-feui.org

Sulistiyadi Dono Iskandar,
M.Sc.
sulistiadi.dono81@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, S.E.
nia.kurnia@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Capaian dan Program
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim di Indonesia – 1

Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga di Indonesia
– 2



Labor Market Brief dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

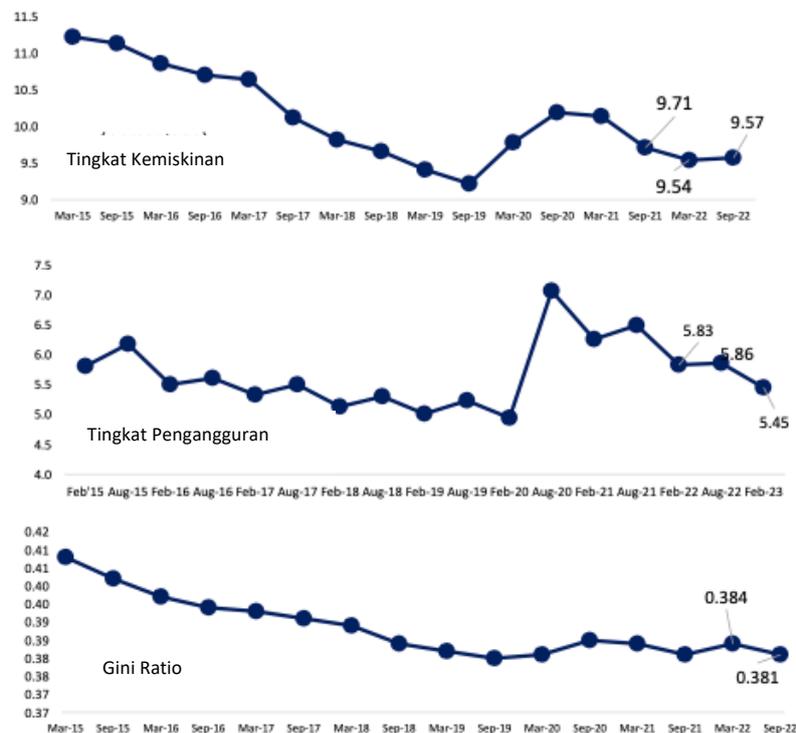
Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

Ringkasan

Isu mengenai kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Beberapa upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga sejalan dengan peningkatan kesetaraan gender. Labor Brief bulan Mei 2023 membahas mengenai upaya tersebut dan bagaimana capaiannya saat ini. Selain itu, brief bulan ini juga membahas mengenai kesetaraan gender dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Capaian dan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Selain itu, perhatian terhadap kemiskinan juga tertuang dalam pilar pertama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yaitu Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan pemerintah disusun untuk mencapai target pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Perkembangan Indikator Kemiskinan, Pengangguran, dan Gini Ratio

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian, 2023

Sejak tahun 2015, tercatat bahwa kemiskinan Indonesia menunjukkan trend menurun, meskipun sempat meningkat pada periode pandemi COVID-19. Pada periode pemulihan pandemi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan situasi sosial yang mengalami perbaikan, angka kemiskinan kembali menurun dan disertai dengan penurunan angka pengangguran serta gini ratio. Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Di sisi lain, untuk kemiskinan ekstrim¹, trend capaian Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan terus menurun dari September 2021 (2,14%) sampai dengan September 2022 (1,74%). Meskipun demikian, dengan memperhatikan laju penurunan angka kemiskinan ekstrim Indonesia, target untuk mencapai kemiskinan ekstrim sebesar 0% pada tahun 2024 masih menantang untuk dipenuhi.

Langkah strategis diambil oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi target penurunan kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2022, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Presiden memberikan arahan mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa strategi kebijakan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga hal tersebut kemudian menjadi tiga pilar utama dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrim.

Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menjadi *focal point* mengeluarkan sejumlah Keputusan Menteri. Salah satunya mengatur mengenai penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang menjadi basis dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (Kepmenko PMK No 30/2022). Selain itu, pemerintah juga menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim melalui Kepmenko PMK No 7/ 2023.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, program yang menjadi fokus dari pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses ke lapangan pekerjaan, program padat karya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan UMKM. Komitmen pemerintah untuk hal tersebut juga tertuang dalam Kepmenko Ekonomi No 31/ 2022 Tentang Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Pelaksanaan program pemberdayaan diarahkan kepada masyarakat sangat miskin yang belum mendapatkan program seperti Kartu Prakerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Tunai Pedagang

¹ Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai hidup di bawah Garis Kemiskinan Internasional, yaitu \$1,90 per hari (Bank Dunia). Pada tahun 2022 setara dengan Rp11.633 per hari atau Rp348.990 per bulan (BPS).

Kaki Lima, Warung dan Nelayan yang mana program-program tersebut juga tetap dilanjutkan pada tahun 2023 sebagai upaya untuk mendorong pengentasan kemiskinan di Indonesia.

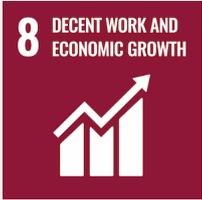
Salah satu program yang telah diinisiasi adalah reformasi aset maupun reformasi akses untuk meningkatkan daya saing usaha dan kapasitas usaha UKM, petani, dan pembudidaya ikan di Kabupaten Garut yang dilakukan lintas kementerian sejak tahun 2020. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas tetapi juga akses keuangan. Program seperti ini juga sejalan dengan komitmen ASEAN yang mempromosikan pemberdayaan komunitas lokal, termasuk komunitas pedesaan, melalui pengimplementasian SDGs di tingkat lokal dan memfasilitasi jejaring dan serta kemitraan antara Negara Anggota ASEAN.

Pengarusutamaan Gender dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia, pemberdayaan perempuan tidak luput dari perhatian pemerintah. Salah satu pertimbangannya adalah karena persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada Maret 2022 tercatat lebih banyak perempuan (9,68%) dibandingkan laki-laki (9,4%). Selain itu, BPS juga mencatat bahwa upah rata-rata per jam pekerja untuk perempuan lebih rendah (Rp16.056) dibandingkan dengan laki-laki (Rp18.261) pada tahun 2022 dan pola ini terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kemiskinan di kalangan perempuan juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang menjadi pertimbangan pertama adalah perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, sehingga perempuan perlu mandiri secara ekonomi serta mempertimbangkan kebutuhan akses ke perawatan jangka panjang. Yang kedua, perempuan terutama di pedesaan cenderung bekerja di sektor informal dengan karakteristik yang lebih rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi perlu secara inklusif juga menjangkau perempuan sesuai dengan kebutuhannya.

Arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan yaitu (1) meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan berperspektif gender; (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan; (3) penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) pengurangan pekerja anak; dan (5) mencegah perkawinan anak. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Program ini diharapkan tidak hanya mendorong desa sebagai satuan pembangunan yang paling dekat dengan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman perempuan dan anak, melindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi perempuan di desa.



Dengan demikian, program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dapat ditingkatkan tidak hanya untuk mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Perhatian terhadap kesetaraan gender dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim akan menjadi langkah yang strategis untuk diambil pemerintah, tidak hanya dapat memenuhi TPB pilar ke-1 yaitu Tanpa Kemiskinan, tetapi juga TPB pilar ke-5 yaitu Kesetaraan Gender.

Referensi:

- ASEAN Secretariat, 2023. *ASEAN Strategies in Alleviating Regional Poverty in Post- Pandemic Recovery*. Paparan pada ASEAN Socio-Cultural Community Knowledge Forum, 7 Mei 2023 di Bali.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023. *Program and Policy Convergence to Achieve Zero Extreme Poverty in Indonesia*. Paparan pada ASEAN Socio-Cultural Community Knowledge Forum, 7 Mei 2023 di Bali.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023. *Gender Mainstreaming into Poverty Reduction Program*. Paparan pada ASEAN Socio-Cultural Community Knowledge Forum, 7 Mei 2023 di Bali.

